

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekuasaan merupakan isu yang sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam politik, bisnis, pendidikan, dan masyarakat umum. Konsep kekuasaan mencerminkan dinamika antara individu, kelompok, atau institusi yang mempengaruhi distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kekuasaan dalam hubungan sosial sering termanifestasi dalam bentuk ketidaksetaraan, ketergantungan, dan pengaruh dominan (Sultoni, 2022). Sebagai contoh, dalam lingkup politik, kekuasaan terlihat dalam kompetisi antara partai politik, pengaruh oligarki politik, dan ketergantungan pemilih terhadap elit politik. Dalam bisnis, kekuasaan terlihat dalam struktur hirarki perusahaan dan pengaruh pemegang saham utama. Dalam masyarakat, kekuasaan dapat terlihat dalam bentuk dominasi kelompok etnis atau kelas sosial tertentu terhadap kelompok yang lebih lemah.

Sebagai negara demokratis, kekuasaan politik terlihat dalam kompetisi politik, pemilihan umum, dan pembentukan pemerintahan. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif, beberapa isu terkait kekuasaan politik masih perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah dominasi politik oleh kelompok tertentu atau oligarki politik, di mana kekuasaan politik terpusat pada segelintir individu atau kelompok tertentu yang memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat. Hal ini dapat menghambat

pluralitas politik dan partisipasi publik yang lebih luas. Praktik-praktik ini menghasilkan ketimpangan, ketidaksetaraan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas sistem politik.

Pada realitasnya, isu kekuasaan kerap ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Isu ini menjadi isu yang tidak lagi asing, banyak ditemukan kasus-kasus dalam masyarakatan yang berkaitan dengan isu kekuasaan, Bahkan untuk sebagian orang, isu mengenai kekuasaan dinormalisasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau politik dapat menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika beberapa individu atau kelompok memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya, pengetahuan, atau posisi hierarkis, mereka memiliki keunggulan dalam mempengaruhi dan mengendalikan orang lain.

Seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi pada laman berita nasional Kompas, Rafael Alun Trisambodo, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Selama sekitar 12 tahun, Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahaannya yang bernama PT Artha Mega Ekadhana yang bergerak di bidang konsultan pajak (Farisa, 2023). Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan di dalam pengadaan proyek pemerintah yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Proyek-proyek pemerintah seringkali diatur melalui penyalahgunaan kekuasaan

antara pihak swasta dan pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya praktik-praktik korupsi. Penggunaan kekuasaan yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah menjadi salah satu penyebab utama masalah ini dapat terjadi.

Lalu pada wilayah daerah-daerah di Indonesia, kasus-kasus yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan masih saja terjadi. Seperti yang terjadi di kecamatan Gajah, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terdapat delapan kepala desa yang dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum karena menerima suap kepada Dosen UIN Walisongo selama proses seleksi perangkat desa (Fadilah, 2023). Merujuk dari tersangka-tersangka yang disebutkan dalam kasus di atas, membuktikan bahwa masih banyak ditemukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan pada tingkatan baik tinggi maupun yang lebih rendah. Tetapi, masih banyak lapisan masyarakat yang seolah tidak peduli dan ambil pusing mengenai isu kekuasaan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang membuat pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan hanya bisa mengamini dan membiarkan skenario itu terjadi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai penerimaan keluarga militer terhadap representasi kekuasaan dalam film “Autobiography”. Alasan pemilihan film sebagai landasan sebuah penelitian yaitu karena film merupakan hal yang dekat dengan masyarakat, dan sebagian masyarakat pasti sering atau paling tidak pernah menonton film. Alasan selanjutnya yaitu berdasarkan apa yang dikatakan

Greme Turner (dalam Sonata, 2022), Film merupakan media yang memiliki kekuatan untuk memvisualisasikan dan merepresentasikan gambaran realitas yang ada di masyarakat. Melalui cerita, karakter, dan penggambaran visualnya, film mampu menghadirkan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat dengan cara yang menarik dan memikat. Film dapat mencerminkan beragam situasi, konflik, hubungan sosial, nilai-nilai, dan isu-isu yang ada di sekitar kita. Dalam beberapa kasus, film bahkan dapat menjadi cermin sosial yang memperlihatkan berbagai realitas yang terkadang sulit diungkapkan secara langsung atau dihadirkan dalam bentuk narasi. Dengan begitu, film memiliki potensi untuk menyajikan gambaran realitas masyarakat yang beragam, memberikan sudut pandang baru, menginspirasi pemirsa, dan memicu refleksi atas isu-isu yang diangkat.

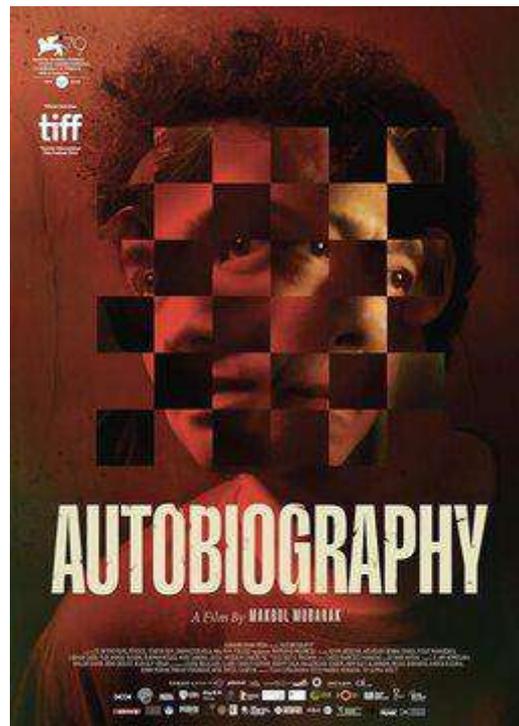
Film *Autobiography* tidak hanya mengangkat relasi kuasa secara eksplisit melalui karakter-karakter yang dihadirkan, tetapi juga menyuguhkan simbolisme dan estetika yang menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus maupun koersif. Representasi ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Di tengah upaya demokratisasi, jejak-jejak relasi kuasa yang dibentuk oleh militerisasi masa lalu masih kerap terlihat dalam berbagai sektor, termasuk dalam cara masyarakat memaknai institusi militer.

Namun demikian, pemaknaan terhadap representasi kekuasaan dalam film tidak bersifat tunggal. Stuart Hall (1980) melalui teori encoding/decoding menyatakan bahwa audiens tidak pasif menerima pesan, melainkan secara aktif

menafsirkan makna berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ideologis mereka. Oleh karena itu, audiens dari latar belakang tertentu, seperti keluarga militer, memiliki kemungkinan membaca film dengan cara yang berbeda dibandingkan audiens umum.

Keluarga militer merupakan kelompok sosial yang memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan institusi militer. Nilai-nilai seperti loyalitas, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap hierarki kekuasaan sudah tertanam dalam keseharian mereka. Hal ini menjadikan keluarga militer sebagai subjek yang menarik dalam studi resepsi media, terutama ketika media yang dikaji merepresentasikan kekuasaan militer secara kompleks. Bagaimana keluarga militer menafsirkan representasi kekuasaan dalam film *Autobiography*? Apakah mereka menerima representasi tersebut secara hegemonik, menegosiasinya, atau bahkan menolaknya?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keluarga militer memaknai representasi relasi kekuasaan dalam film *Autobiography*, serta mengungkap faktor-faktor sosial dan ideologis yang memengaruhi cara mereka menafsirkan film tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian komunikasi media dan wacana kekuasaan di Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara representasi media dan latar belakang audiens yang memiliki kedekatan dengan institusi kekuasaan.



Gambar 1.1 Poster film “Autobiography”

Sumber: Wikipedia

Film “Autobiography” merupakan film Indonesia dengan genre drama dan *thriller* politik. Film “Autobiography” sukses mendapatkan belasan penghargaan dalam festival bergengsi di tingkat nasional dan internasional, beberapa yang paling bergengsi yaitu The International Critics Prize for Best Film in Orizzonti from the International Federation of Film Critics (FIPRESCI) Venice Film Festival 2022, juga Grand Prize Winner-TOKYO FILMeX International Film Festival 2022, termasuk Best Screenplay-Asia Pacific Screen Awards 2022 (Pamela, 2023). Film ini mengangkat isu kekerasan dan kekuasaan di sepanjang alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang Rakib, seorang penjaga rumah yang bertugas di sebuah rumah kosong yang dimiliki oleh seorang jenderal terkemuka bernama Purnawinata. Suatu hari, Purna kembali ke rumah tersebut untuk

melaksanakan kampanye sebagai calon bupati di kampung halamannya. Rakib secara tidak sengaja terlibat dalam perjalanan kampanye dan menemukan fakta mengejutkan yang melibatkan majikannya (Usmanda, 2023).

Dalam penelitian milik (Yuliastati, 2023) yang berjudul “Representasi Kekuasaan dan Kekerasan dalam Film “Autobiography” Karya Makbul Mubarak dalam Perspektif Roland Barthes”, menyebutkan bahwa film “Autobiography” berhasil merepresentasikan dinamika kuasa dan kekerasan yang melibatkan karakter-karakter yang saling mempengaruhi dan memanfaatkan kekuasaan. Pesan-pesan ini disampaikan dengan subtil melalui adegan-adegan yang menarik perhatian penonton dan membangkitkan refleksi mengenai realitas kehidupan dan politik yang kompleks. Purna, sebagai pensiunan tentara dengan kepribadian yang tenang dan empatik, memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk berkomunikasi politik dengan cara-cara konvensional. Pengaruhnya dihadapkan pada kekuatan politik dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengembang yang memiliki konflik lahan dengan warga setempat. Film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan sang jenderal menghegemoni warga, terlihat melalui adegan-adegan intimidatif yang menimbulkan ketakutan. Penelitian sebelumnya inilah yang menjadi landasan peneliti memilih film “Autobiography”, dikarenakan film ini digadang-gadang merupakan film yang membawa banyak adegan mengenai betapa kuatnya kekuasaan, terutama pada kekuasaan dalam bidang politik. Seperti ulasan yang dituliskan dalam beberapa artikel dan berita di bawah ini:

“Autobiography menunjukkan secara jelas seperti apa bahaya kekuasaan ketika berada di tangan yang salah. Kekuasaan sangat mungkin dimanfaatkan untuk melakukan apa pun yang dikehendaki pemiliknya, tanpa memikirkan nilai, adab, norma, serta keselamatan orang lain.” (Pamela, 2023) dalam laman berita liputan6.

“Film Autobiography ini adalah film yang membuat para penontonnya berpikir, merenung, sekaligus berefleksi. Benarkah orang kecil tak punya kuasa untuk melindungi apa-apa yang menjadi hak miliknya? Benarkah alam dan sumber dayanya hanya milik orang yang punya kekuasaan?” (Sulistyo, 2023) dalam laman berita Kompas.

“isu yang diangkat film ini sebenarnya sangat relate pada realitas kita. Enggak jarang, ‘kan, kita melihat bagaimana seseorang bertingkah seenaknya karena punya jabatan atau karena punya koneksi dengan orang lain yang punya jabatan.” (Usmanda, 2023) dalam artikel Kincir.

Berlandaskan ulasan-ulasan tersebut, peneliti menelusuri lebih dalam mengenai respon audiens terhadap isu kekuasaan bagi yang telah menonton film “Autobiography” melalui berbagai macam *platform* di Internet. Peneliti mendapati adanya komentar “Pro” dan “Kontra” mengenai isu kekuasaan yang ditampilkan dalam film “Autobiography”. Pendapat-pendapat “Pro” ini ditemukan dalam komentar-komentar audiens di sosial media. Mereka setuju pada penggambaran karakter antagonis, Purna sebagai sosok purnawirawan militer yang memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut dengan memberikan teror kepada masyarakat desa setempat agar menyetujui kehendak

Purna untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) sekaligus mencalonkan dirinya sebagai Bupati.



Gambar 1.2 Komentar audiens yang bersikap pro terhadap penggambaran sosok

Purna sebagai karakter antagonis yang menggunakan kekuasaan

Sumber: Twitter

Sebaliknya, komentar-komentar audiens yang bersifat kontra berisi ketidaksetujuan mereka mengenai penggambaran karakter Purna sebagai antagonis yang menggunakan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut dengan memberikan teror kepada masyarakat desa setempat agar menyetujui kehendak Purna untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) sekaligus mencalonkan dirinya sebagai Bupati.



Gambar 1.3 Komentar audiens yang bersikap kontra terhadap penggambaran sosok Purna sebagai karakter antagonis yang menggunakan kekuasaan

Sumber: Twitter

Berdasarkan pendapat-pendapat audiens penonton film “Autobiography”, menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti bagaimana resepsi audiens terhadap adegan-adegan yang berkaitan dengan kekuasaan dalam film “Autobiography”. Dengan latar belakang yang berbeda-beda dari audiens sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu bagaimana penerimaan mereka mengenai tokoh Purna merepresentasikan kekuasaan dalam film “Autobiography”. Hasil wawancara informan nantinya akan dianalisis menggunakan teori resepsi milik Stuart Hall dan akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keluarga militer memaknai representasi kekuasaan dalam film *Autobiography*?
2. Apa saja posisi decoding yang muncul dari resepsi keluarga militer terhadap representasi relasi kuasa dalam film tersebut?
3. Faktor-faktor apa yang memengaruhi cara keluarga militer menafsirkan representasi kekuasaan dalam film?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana keluarga militer menafsirkan representasi kekuasaan dalam film *Autobiography*.
2. Untuk mengidentifikasi posisi decoding (hegemonik, negosiasi, atau oposisi) dari resepsi keluarga militer terhadap film tersebut.
3. Untuk menganalisis faktor sosial, budaya, dan pengalaman yang memengaruhi pemaknaan mereka terhadap relasi kuasa dalam film.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, terutama sebagai sumber referensi dan wawasan pada bidang ilmu komunikasi khususnya pada kajian yang membahas mengenai resepsi dan juga isu kekuasaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca penelitian ini. Semoga dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat lebih kritis dan sadar mengenai pentingnya isu kekuasaan yang masih sering terjadi di Indonesia.